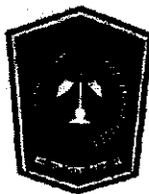


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
KECAMATAN TEMPEH
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BAB I
PENDAHULUAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;

- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - t. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
 - u. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - v. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
 - w. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- x. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD**
 - 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
 - 2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
- BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
 - 3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - Belanja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)
 - 3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
 - 3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - a. Beban
 - b. Kegiatan Non Operasional
 - c. Pos-pos Luar Biasa
 - d. Surplus (Defisit) LO
 - 3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 3.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
- BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN**
- BAB V PENUTUP**

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Tempeh Tahun 2021 sebagai berikut :

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH DAERAH

OPD Kecamatan Tempeh adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tidak memiliki kewenangan mengelola pendapatan, sehingga tidak menghasilkan PAD.

b. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh OPD Kecamatan Tempeh meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	2.021.779.667,00	1.989.567.148,00	98,41	32.212.519,00
2	Belanja Modal	0	0	0	0
	Jumlah Belanja	2.021.779.667,00	1.989.567.148,00	98,41	32.212.519,00

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 - 2021

Belanja Operasi	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	371.062.029,00	1.293.316.861,00	1.526.989.634,00	1.565.165.383,00	1.298.549.177,00
Belanja Barang dan Jasa	705.837.071,00	1.047.398.759,00	1.084.768.593,00	757.122.615,00	691.017.971,00
Jumlah	1.076.900.100,00	2.340.714.620,00	2.611.758.227,00	2.322.287.998,00	1.989.567.148,00
% Realisasi	98,83	93,78	94,88	98,09	98,41
% Kemungkinan	-1,33	-2,24	-8,98	4,11	-8,99

- Realisasi belanja pada tahun 2017 mengalami penurunan 1,33% dibandingkan realisasi belanja tahun 2016.

Penurunan terjadi sebagai dampak dari adanya penataan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang, sehingga mempengaruhi kelancaran penyerapan anggaran.

- Realisasi belanja pada tahun 2018 mengalami penurunan 2,44% dibandingkan realisasi belanja tahun 2017.
- Realisasi belanja pada tahun 2019 mengalami penurunan 0,90% dibandingkan realisasi belanja tahun 2018.
- Realisasi belanja pada tahun 2020 mengalami kenaikan 4,11% dibandingkan realisasi belanja tahun 2019.
- Realisasi belanja pada tahun 2021 mengalami penurunan 0.59% dibandingkan realisasi belanja tahun 2020.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut :

7.01.01	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		
7.01.01.2.02	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
7.01.01.2.02.01	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai		1.297.277.551,00	1.293.618.377,00	Realisasi : - Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 912.120.519,00 - Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp.67.670.550,00 - Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 59.370.000,00 - Belanja & Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 18.380.000,00 - Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 41.713.920,00 - Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS Rp. 445.132,00 - Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 10.841,00 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 1.487.805,00 - Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 4.463.379,00 - Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 381.497.858,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		1.297.277.551,00	1.293.618.377,00	

7.01.01.2.02.02	:	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
- Belanja Pegawai		4.930.800,00	4.930.800,00	Realisasi : - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 4.930.800,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		4.930.800,00	4.930.800,00	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.302.208.351,00	1.298.549.177,00	

7.01.01.2.06	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
7.01.01.2.06.04	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		27.299.480,00	22.081.880,00	Realisasi : - Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 239.000,00 - Belanja Alat/Bahan - untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 21.302.380,00 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 540.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		27.299.480	22.081.880	

7.01.01.2.06.07	:	Penyediaan Bahan/Material		
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		90.000,00	90.000,00	Realisasi : - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 90.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		90.000,00	90.000,00	

7.01.01.2.06.08	:	Fasilitas Kunjungan Tamu		
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		1.940.400,00	1.938.000,00	Realisasi : - Belanja Natura dan Pakan - Natura Rp. 1.938.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		1.940.400,00	1.938.000,00	

7.01.01.2.06.09	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		27.216.000,00	27.077.000,00	Realisasi : - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 8.310.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 2.417.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 16.350.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		27.216.000,00	27.077.000,00	

7.01.01.2.08	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
7.01.01.2.08.01	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		1.800.000,00	1.800.000,00	Realisasi : - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 1.800.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		1.800.000,00	1.800.000,00	

7.01.01.2.08.02	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		44.077.536,00	41.374.216,00	Realisasi : - Belanja Tagihan Air Rp. 368.500,00 - Belanja Tagihan Listrik Rp. 27.696.761,00 - Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan Rp. 13.308.955,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		44.077.536,00	41.374.216,00	

7.01.01.2.08.04	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		255.900.000,00	246.866.200,00	Realisasi : - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 142.800.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 24.000.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp. 12.000.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 36.000.000,00 - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non

			ASN Rp. 29.139.810,00 - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 2.498.215,00 - Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 428.175,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	255.900.000,00	246.866.200,00	

7.01.01.2.09	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	24.732.200,00	24.087.675,00	Realisasi : - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 10.585.375,00 - Belanja Suku Cadang – Suku Cadang Alat Angkutan Rp.2.176.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 11.326.300,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	24.732.200,00	24.087.675,00	

7.01.01.2.09.05	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa	2.830.700,00	2.825.000,00	Realisasi : - Belanja Pemeliharaan Alat Besar – Alat Bantu - Electric Generating set Rp. 330.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Pendingin Rp.1.145.000,00 - Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 700.000,00 - Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp. 650.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	2.830.700,00	2.825.000,00	

7.01.03	:	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
7.01.03.2.01.01	:	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		3.285.000,00	3.285.000,00	Realisasi : - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 135.000,00 - Belanja Makan dan Minum Rapat Rp.3.150.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		3.285.000,00	3.285.000,00	

7.01.01.03.2.01.03	:	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		12.420.000,00	12.413.000,00	Realisasi : - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 263.000,00 - Belanja Makan dan Minum Rapat Rp.12.150.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		12.420.000,00	12.413.000,00	

7.01.05	:	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
7.01.05.2.01.08	:	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		1.800.000,00	1.800.000,00	Realisasi : - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 1.800.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		1.800.000,00	1.800.000,00	

7.01.06	:	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN		
7.01.06.2.01.02	:	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang dan Jasa		302.400.000,00	291.600.000,00	Realisasi : - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 291.600.000,00

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	302.400.000,00	291.600.000,00	

7.01.01.06.2.01.06	:	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan	
- Belanja Barang dan Jasa	13.780.000,00	13.780.000,00	Realisasi : - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.800.000,00 - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Rp.9.300.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 730.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp 1.950.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	13.780.000,00	13.780.000		

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di Neraca terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan OPD Kecamatan Tempeh selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d. 2021

Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Aset	1.192.408.385,02	915.773.777,36	1.006.186.873,52	983.689.781,64	864.382.724,80
2. Kewajiban	15.932.603,00	33.814.542,00	50.128.086,00	32.839.956,00	35.093.955,00
3. Ekuitas	1.176.475.782,02	881.959.235,36	956.058.787,52	950.849.825,64	950.849.825,64
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	1.192.408.385,02	915.773.777,36	1.006.186.873,52	983.689.781,64	985.943.680,64

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut :

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK OPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK OPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan OPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. OPD masih menganggap barang daerah bukan

merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut diatasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset OPD melalui kegiatan yang dikoordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA OPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1) Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II bahwa OPD Kecamatan Tempeh adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tidak memiliki kewenangan mengelola pendapatan, sehingga tidak menghasilkan PAD.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
2) Belanja Daerah	2.021.779.667,00	1.989.567.148,00	2.402.521.998,00

Belanja OPD Kecamatan Tempeh meliputi belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp 1.989.567.148,00. Realisasinya mencapai 98,41% dari anggaran sebesar Rp 2.021.779.667,00. Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi belanja tahun 2021 mengalami kenaikan 0,59%.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
3) Belanja Operasi	2.021.779.667,00	1.989.567.148,00	2.322.287.998,00

Belanja operasi pada OPD Kecamatan Tempeh terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel : 3.1
Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	1.302.208.351,00	1.298.549.177,00	99,72	1.565.165.383,00
2	Belanja Barang dan Jasa	719.571.316,00	691.017.971,00	96,03	757.122.615,00
	Jumlah	2.021.779.667,00	1.989.567.148,00	98,41	2.322.287.998,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	1.302.208.351,00	1.298.549.177,00	1.565.165.383,00

Belanja pegawai meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai serta belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS, sedangkan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut :

Tabel : 3.2
Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 dan 2020

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN				
	BELANJA PEGAWAI				
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	720.828.712,00	718.578.892,00	99,69	865.136.886,00
2	Tunjangan keluarga PNS	67.879.074,00	67.670.550,00	99,69	80.924.612,00
3	Tunjangan jabatan PNS	59.420.000,00	59.370.000,00	99,92	74.125.000,00
4	Tunjangan fungsional umum	18.430.002,00	18.380.000,00	99,73	21.340.000,00
5	Tunjangan beras PNS	41.844.285,00	41.713.920,00	99,69	41.786.340,00
6	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	461.376,00	445.132,00	96,48	1.109.616,00
7	Pembulatan gaji	12.368,00	10.841,00	87,65	11.328,00
8	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	1.513.600,00	1.487.805,00	98,30	7.045.922,00
9	Iuran jaminan kematian PNS	4.520.384,00	4.463.379,00	98,74	-
9	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	382.367.750,00	381.497.858,00	99,77	462.685.679,00
	Jumlah belanja Pegawai	1.297.277.561,00	1.293.618.377,00	99,72	1.554.165.383,00
	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN				
	BELANJA PEGAWAI				
1	Honorarium	4.930.800,00	4.930.800,00	100,00	9.675.000,00
2	Uang lembur	-	-		1.325.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai	4.930.800,00	4.930.800,00	100,00	11.000.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai	1.302.208.351,00	1.298.549.177,00	99,72	1.565.165.383,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(b) Belanja Barang dan Jasa	719.571.316,00	691.017.971,00	757.122.615,00

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2021 dan 2020

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Persediaan	67,927,080.00	62,679,255.00	60.200.350,00
2	Belanja Jasa	611,677,536.00	589,140,416.00	604.698.616,00
3	Belanja Pemeliharaan	14,780,700.00	14,151,300.00	25.275.649,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	25,186,000.00	25,047,000.00	55.354.000,00
5	Belanja Lainnya	-	-	11.594.000,00
	Jumlah	719.571.316,00	691.017.971,00	757.122.616,00

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; Pemeliharaan Kendaraan Dinas; belanja alat kebersihan dan bahan pembersih; Belanja alat tulis kantor, belanja benda pos, belanja cetak dan penggandaan; belanja pakan natura dan belanja makanan dan minuman rapat. Belanja Persediaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 62,679,255,00, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Persediaan tahun 2021

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Bahan Bakar dan Pelumas	10,694,200.00	10,675,375.00
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	239,800.00	239,500.00
3	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2,178,000.00	2,176,000.00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26,519,680.00	21,302,380.00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	405,000.00	398,000.00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	540,000.00	540,000.00
7	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1,940,400.00	1,938,000.00
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,410,000.00	25,410,000.00
	Jumlah	67,927,080.00	62,679,255.00

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi Honorarium Tim Panwascam pelaksanaan pilkades serentak; belanja jasa kantor; Belanja jasa /upah tenaga kerja; dan belanja lainnya yang bersifat jasa.

Belanja Jasa OPD Kecamatan Tempeh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 589,140,416.00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021

No	Belanja Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9,300,000.00	9,300,000.00
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	445,200,000.00	434,400,000.00
3	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24,000,000.00	24,000,000.00
4	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12,000,000.00	12,000,000.00
5	Belanja Jasa Tenaga Supir	36,000,000.00	36,000,000.00
6	Belanja Tagihan Air	390,000.00	368,500.00
7	Belanja Tagihan Listrik	29,277,536.00	27,696,761.00
8	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14,410,000.00	13,308,955.00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	37,500,000.00	29,139,810.00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3,037,500.00	2,498,215.00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	562,500.00	428,175.00
	Jumlah	611,677,536.00	589,140,416.00

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; kendaraan dinas; alat pendingin; computer dan printer.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 14,151,300.00, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	335,000.00	330,000.00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11,950,000.00	11,326,300.00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1,145,700.00	1,145,000.00
4	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	700,000.00	700,000.00
5	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	650,000.00	650,000.00
	Jumlah	14,780,700.00	14,151,300.00

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 55.354.000,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,286,000.00	3,147,000.00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,900,000.00	21,900,000.00
	Jumlah	25,186,000.00	25,047,000.00

(5) **Belanja Lainnya**

Belanja lainnya merupakan belanja yang tidak termasuk dalam belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, atau belanja perjalanan dinas. Belanja lainnya Kecamatan Tempoh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 0 (Nihil) terinci sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Lainnya tahun 2021

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	NIHIL		
2			
3			
	Jumlah	0	0

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(c) Belanja Modal	0	0	80.234.000.00

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2021 Rp. 0 (Nihil) sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				80.234.000.00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		NIHIL		0.00
	Jumlah				80.234.000.00

Belanja modal peralatan dan mesin meliputi belanja modal alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat kantor, perlengkapan kantor, komputer, alat-alat studio, dan alat komunikasi yang nilainya memenuhi kapitalisasi.

Belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 0 (Nihil) terinci sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	NIHIL		
2			
3			
	Jumlah		

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari kas di Bendahara Pengeluaran dan persediaan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	12.462.245,00	23.403.420,00
Jumlah	12.462.245,00	23.403.420,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran OPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12
Mutasi kas di bendahara pengeluaran Tahun 2021 dan 2020

1. Saldo 31 Desember 2020		0,00
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	20.000.000,00	
- SP2D TUP	26.519.680,00	
- SP2D GU	124.655.945,00	
- Penerimaan PFK	4.548.889,00	
- Kelebihan Belanja	,00	
Jumlah Penerimaan		175.724.514,00
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	124.655.945,00	
- SPJ GU Nihil	14.450.636,00	
- SPJ TU Nihil	21.302.380,00	
- Setor kembali sisa TUP	5.217.300,00	
- Setor kembali sisa UP/GU	5.549.364,00	

- Pengeluaran PFK	4.548.889,00	
- Setor kembali pengurangan UP	-	
- Setor kembali kelebihan belanja	-	
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	-	
Jumlah pengeluaran		175.724.514,00
4. Saldo 31 Desember 2021		0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b) Persediaan	12.452.245,00	23.403.420,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 3.13
Laporan Persediaan Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Persediaan per 31 Desember 2020	23.403.420,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal	-
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)	23.403.420,00
4	Ditambah :	
5	Belanja Persediaan LRA 2021	62.679.255,00
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	-
7	Belanja Persediaan BOS	-
8	Penerimaan hibah persediaan	-
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	62.679.255,00
10	Dikurangi :	
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2021	-
12	Pengeluaran hibah persediaan	-
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)	-
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan	86.082.675,00
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)	73.630.430,00
16	Persediaan tahun 2021 (14 -15)	12.452.245,00

Tabel 3.14
Daftar Persediaan Tahun 2021 dan 2020

<i>dalam rupiah</i>			
No	Persediaan	2021	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	10.552.245,00	18.098.520,00
2	Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	1.025.000,00	2.897.500,00
3	Persediaan Benda Pos	0,00	0,00

No	Persediaan	2021	2020
4	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	907.400,00
5	Umbul-Umbul/Bendera	0,00	0,00
6	Persediaan Barang cetakan	875.000,00	1.500.000,00
	Jumlah	12.452.245,00	23.403.420,00

b. ASET TETAP

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Aset Tetap	799.884.979,80	908.240.861,64

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dikelola OPD Kecamatan Tempeh meliputi tanah, peralatan dan mesin, dan gedung dan bangunan.

Seluruh aset tetap yang dikelola OPD Kecamatan Tempeh disusutkan, kecuali tanah. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut :

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya diabaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah, kecuali : (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap dan baru diketahui dikemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.15
Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	187.493.333,00	0,00	0,00	0,00	187.493.333,00
2	Peralatan dan Mesin	914.615.900,00	0,00	0,00	0,00	914.615.900,00
3	Gedung dan Bangunan	1.019.108.288,00	0,00	0,00	0,00	1.019.108.288,00
4	Jumlah Aset Tetap	2.121.217.521,00	0,00	0,00	0,00	2.121.217.521,00

dalam rupiah

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
5	Dikurangi Akumulasi Penyusutan	1.212.976.859,36	0,00	0,00	108.355.881,84	1.321.332.541,20
	Total	908.240.881,84	0,00	0,00	108.355.881,84	799.884.979,80

Rincian mutasi penambahan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Tanah	Rp. 187.493.333,00	Rp. 187.493.333,00

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 187.493.333,00 dan Rp. 187.493.333,00, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.16
Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Rumah Dinas	42.133.333,00	0,00	0,00	0,00	42.133.333,00
2	Tanah Kantor	145.360.000,00	0,00	0,00	0,00	145.360.000,00
	Jumlah	187.493.333,00	0,00	0,00	0,00	187.493.333,00

Nilai aset tetap tanah tahun 2021 tidak mengalami mutasi. Daftar rincian nilai Tanah sebagaimana terlampir di Kartu Inventaris Barang (KIB) A.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	914.615.900,00	914.615.900,00

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 914.615.900,00 dan Rp. 914.615.900,00, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.17
Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
2	Alat-alat Angkutan	244.882.000,00	0,00	0,00	0,00	244.882.000,00
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	535.866.600,00	0,00	0,00	0,00	535.866.600,00
4	Alat-alat Studio dan Komunikasi	22.567.300,00	0,00	0,00	0,00	22.567.300,00
	Jumlah	914.615.900,00	0,00	0,00	0,00	914.615.900,00

Pada tahun 2021 tidak ada mutasi aset tetap peralatan dan mesin

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	1.019.108.288,00	1.019.108.288,00

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.19
Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	1.019.108.288,00	0,00	0,00	0,00	1.019.108.288,00
	Jumlah	1.019.108.288,00	0,00	0,00	0,00	1.019.108.288,00

Pada tahun anggaran 2021 tidak terdapat mutasi aset tetap gedung dan bangunan.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(d) Akumulasi Penyusutan	1.321.332.541,20	1.212.976.659,36

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 1.321.332.541,20 dan 1.212.976.659,36, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.20
Daftar Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Golongan Barang	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2020	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan 2020	Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2021
1	2	6=3+4+5	4	5	6=3+4+5
1	Peralatan dan Mesin	709.477.340,02	0,00	83.367.609,98	792.844.950,00
2	Gedung dan Bangunan	503.499.319,34	0,00	24.988.271,86	528.487.591,20
	Jumlah	1.212.976.659,36	0,00	108.355.881,84	1.321.332.541,20

c.) ASET LAINNYA

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Aset Lainnya	52.045.500,00	52.045.500,00

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 52.045.500,00 sedangkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 52.045.500,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 3.21
Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
1	Aset Lain-lain	52.045.500,00	0,00	0,00	52.045.500,00
	Jumlah	52.045.500,00	0,00	0,00	52.045.500,00

Aset lain-lain merupakan bagian aset lainnya yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi (barang rusak) yang dimiliki OPD Kecamatan Tempeh, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.22
Daftar Aset Lain-lain (Barang yang Rusak) Per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No.	Nama Aset	Saldo Awal	Mutasi Aset Lain-lain tahun 2021		Saldo Akhir
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Mesin Ketik (Oliveti)	300.000,00	-	-	300,000
2	Mesin Ketik (Triumph)	525.000,00	-	-	525,000
3	Mesin Ketik (Remington)	525.000,00	-	-	525,000
4	Mesin Ketik (Evesin)	735.000,00	-	-	735,000
5	Mesin Ketik (Sanders)	1.275.000,00	-	-	1,275,000
6	Mesin Ketik (Marvel)	1.275.000,00	-	-	1,275,000
7	Filing Kabinet	300.000,00	-	-	300,000
8	Filing Kabinet	750.000,00	-	-	750,000
9	Brandkas	725.500,00	-	-	725,500
10	Kipas Angin (National)	250.000,00	-	-	250,000
11	UPS (Phasor)	2.500.000,00	-	-	2,500,000
12	Komputer (Philips)	6.000.000,00	-	-	6,000,000
13	Komputer (HP)	10.000.000,00	-	-	10,000,000
14	Komputer (Acer)	8.750.000,00	-	-	8,750,000
15	Printer (Epson)	5.750.000,00	-	-	5,750,000
16	Printer (L 100)	2.400.000,00	-	-	2,400,000
17	Scanner (Microtek)	1.350.000,00	-	-	1,350,000
18	Mesin Laminating	4.150.000,00	-	-	4,150,000
19	Radio VHF	250.000,00	-	-	250,000
20	Pesawat Telepon (Tens)	300.000,00	-	-	300,000
21	Mesin Fax (Panasonic)	2.500.000,00	-	-	2,500,000
22	Kelengkapan Komputer	885.000,00	-	-	885,000
23	Kursi Kerja Putar (Rakuda)	550.000,00	-	-	550,000
	JUMLAH	52,045,500	-	-	52,045,500

d). TOTAL SELURUH ASET

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Total Seluruh Aset	864.382.724,80	983.689.781,64

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya (Barang-barang yang rusak) yang dikelola OPD Kecamatan Tempeh per 31 Desember 2021, dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.23

Total Seluruh Aset Per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

NO	URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Aset Lancar	Rp. 12.452.245,00	Rp. 23.403.420,00
2	Aset Tetap	Rp. 799.884.979,80	Rp. 908.240.881,84
3	Aset Lainnya	Rp. 52.045.500,00	Rp. 52.045.500,00
	JUMLAH	Rp. 864.382.724,80	Rp. 983.689.781,84

e). KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban OPD Kecamatan Tempeh per 31 Desember 2021 dan 2020 berupa utang, masing-masing tercatat sebesar Rp. 35.093.855,00 dan Rp. 32.839.956,00 diuraikan sebagai berikut :

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	35.093.855,00	32.839.956,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 35.093.855,00 dan Rp. 32.839.956,00. Kewajiban jangka pendek tersebut berupa utang belanja, sebagai berikut :

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Utang Belanja	35.093.855,00	32.839.956,00

Utang belanja adalah kewajiban lancar OPD Kecamatan Tempeh yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 35.093.855,00 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp. 31.298.080,00 , dan utang belanja dan jasa Rp. 3.795.775,00, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.24
Rincian Utang Belanja Tahun 2020

dalam rupiah

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Utang Belanja pegawai	29.319.019,00	1.979.061,00	0,00	31.298.080,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	3.520.937,00	274.838,00	0,00	3.795.775,00
	Jumlah	32.839.956,00	2.253.899,00	0,00	32.839.956,00

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 31.298.080,00 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (TPP) PNS bulan Desember 2021 yang pembayarannya akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Tabel 3.25
Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2020

dalam rupiah

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2021
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tunjangan keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tunjangan Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tunjangan PPh/ tunjangan khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pembulatan gaji	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Iuran JKK dan JKM	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	29.319.019,00	1.979.061,00	0,00	31.298.080,00
	Jumlah	29.319.019,00	1.979.061,00	0,00	31.298.080,00

Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.795.775,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian air, listrik PLN, dan internet yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.26
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020

dalam rupiah

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Jasa air	52.200,00	0,00	23.400,00	28.800,00
2	Jasa listrik	2.355.505,00	305.810,00	0,00	2.661.315,00

3	Jasa kawat/ faksimili/internet	1.113.232,00	0,00	7.572,00	1105.660,00
	Jumlah	3.520.937,00	305.810,00	30.972,00	3.795.775,00

f). EKUITAS

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
Ekuitas	829.288.569,80	950.849.825,64

Ekuitas adalah kekayaan bersih OPD Kecamatan Tempeh, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.27
Daftar Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Jumlah Aset	864.382.724,80	983.689.781,64
2	Jumlah Kewajiban	35.093.855,00	32.839.956,00
3	Ekuitas	829.288.569,80	950.849.825,64

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus/deficit-LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut :

Tabel 3.28
Daftar Rincian Ekuitas OPD Kecamatan Tempeh
per 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas Awal	950.849.825,64	956.058.787,52
2	Surplus (Defisit) LO	-2.111.128.103,84	-2.407.730.959,88
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	0,00	0,00
4	RK PPKD	1.989.567.148,00	2.402.521.998,00
5	EKUITAS AKHIR	829.288.869,80	950.849.825,64

3.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1). Beban - LO	2.111.128.103,84	2.407.730.959,88

Jumlah tersebut merupakan total beban OPD Kecamatan Tempeh selama tahun 2021 dan 2020 sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.29

Beban Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Akun	2021	2020
1	Beban Pegawai	1.300.528.238,00	1.548.958.248,00
2	Beban Barang dan Jasa	702.243.984,00	747.990.780,00
3	Beban Penyusutan	108.355.881,84	110.781.931,88
	Jumlah Beban	2.111.128.103,84	2.407.730.959,88

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
--------------------------	--------------------------

a). Beban Pegawai

1.300.528.238,00	1.548.958.248,00
-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan jumlah Beban Pegawai-Beban Tidak Langsung dan Beban Pegawai-Beban Langsung tahun 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.30
Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

Uraian	2021	2020
Belanja Gaji Pegawai LRA	1.298.549.177,00	1.565.165.383,00
DITAMBAH : Beban pegawai yang masih harus dibayar		
Beban pegawai yang belum dibayar (utang belanja)	31.298.080,00	29.319.019,00
DIKURANGI :		
Bayar Beban pegawai tahun lalu	29.319.019,00	45.526.154,00
Jumlah Belanja Pegawai - LO	1.300.528.238,00	1.548.958.248,00

Tabel 3.31
Rincian Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Uraian	2021	2020
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	0,00	0,00
2	Tunjangan keluarga	0,00	0,00
3	Tunjangan Jabatan	0,00	0,00
4	Tunjangan PPh/ tunjangan khusus	0,00	0,00
5	Pembulatan gaji	0,00	0,00
6	Iuran JKK dan JKM	0,00	0,00
7	Utang Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (TPP)	31.298.080,00	29.319.019,00
	Jumlah	31.298.080,00	29.319.019,00

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
--------------------------	--------------------------

b). Beban Barang dan Jasa

702.243.984,00	747.990.780,00
-----------------------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban barang dan jasa OPD Kecamatan Tempeh Tahun Anggaran 2021 dan 2020, perhitungannya sebagaimana daftar berikut :

Tabel 3.32
Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

NO	BEBAN BARANG DAN JASA	2020	2020
1	Beban Persediaan	73.630.430,00	52.149.510,00
2	Beban Jasa	589.415.245,00	603.617.621,00
3	Beban Pemeliharaan	14.151.300,00	25.275.649,00
4	Beban Perjalanan Dinas	25.047.000,00	55.354.000,00
5	Beban Lainnya	0,00	11.594.000,00
	JUMLAH	702.243.984,00	747.990.780,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(1) Beban Persediaan	73.630.430,00	52.149.510,00

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2021 dan 2020, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.33
Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2020
1. Belanja Persediaan LRA	62.679.255,00	60.200.350,00
<i>Ditambah</i>		
2. Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu	23.403.420,00	15.352.580,00
<i>Dikurangi</i>		
3. Persediaan barang akhir Periode 31 Desember 2021	12.452.245,00	23.403.420,00
4. Beban Persediaan (1+2-3)	73.630.430,00	52.149.510,00

Tabel 3.34
Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No.	Beban Persediaan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.875.375	-
2	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.146.900	1.843.300,00
3	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.176.000	-
4	Beban alat tulis kantor	28.848.655	18.146.810,00
5	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)	1.872.500	515.000,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.023.000	750.000,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	540.000	546.000,00
8	Beban umbul-umbul/bendera	-	175.000,00
9	Beban makanan dan minuman rapat	25.410.000	14.136.000,00
10	Beban makanan dan minuman tamu	-	179.500,00
11	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.938.000	-
12	Beban makanan dan minuman kegiatan tertentu	-	57.900,00
13	Beban pakaian olah raga	0,00	16.000.000,00
	Jumlah Beban Persediaan	73.630.430,00	52.149.510,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(2) Beban Jasa	589.415.245,00	603.617.621,00

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, upah/ongkos tenaga kerja, operasional dan beban jasa lainnya.

Jumlah beban jasa tahun 2021 dan 2020 Kecamatan Tempeh masing-masing sebesar Rp. 589.415.245,00 dan Rp. 603.617.621,00, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.35
Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Jenis Beban Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	-
2	Beban Jasa Tenaga Administrasi	434.400.000,00	-
3	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	-
4	Beban Jasa Tenaga Keamanan	12.000.000,00	-
5	Beban Jasa Tenaga Supir	36.000.000,00	-
6	Beban air	345.100,00	370.800,00
7	Beban listrik	28.002.571,00	34.295.582,00
8	Beban kawat/fakalmil/internet	13.301.383,00	13.796.628,00
9	Beban dekorasi	-	175.000,00
10	Beban penggantian transport	-	7.200.000,00
11	Beban jasa instruktur/ narasumber/ tenaga ahli	-	150.000,00
12	Beban premi asuransi kesehatan	29.139.810,00	27.256.625,00
13	Beban premi asuransi ketenagakerjaan	2.496.215,00	1.972.976,00
14	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	428.175,00	-
15	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	-	518.400.000,00
	Jumlah	589.415.245,00	603.617.621,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(3) Beban Pemeliharaan	14.151.300,00	25.275.649,00

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, dan gedung dan bangunan.

Beban pemeliharaan Kecamatan Tempeh tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 14.151.300,00 dan Rp. 25.275.649,00, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.36
Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2021	Tahun 2020
1.	Beban bahan bakar minyak dan pelumas	-	11.708.849,00
2.	Beban jasa servis dan penggantian suku cadang	-	5.837.500,00
3.	Beban STNK kendaraan dinas/operasional	-	1.450.300,00
4.	Beban pemeliharaan electric generating set	330.000,00	725.000,00

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2021	Tahun 2020
5.	Beban pemeliharaan alat reproduksi (pengganda)	-	735.000,00
6.	Beban pemeliharaan alat pembersih	-	169.000,00
7.	Beban pemeliharaan alat pendingin	1.145.000,00	2.925.000,00
8.	Beban pemeliharaan personal komputer	700.000,00	1.290.000,00
9.	Beban pemeliharaan peralatan personal komputer	650.000,00	435.000,00
10.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.326.300,00	0,00
	Jumlah	14.151.300,00	25.275.649,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(4) Beban Perjalanan Dinas	25.047.000,00	55.354.000,00

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.37
Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

<i>dalam rupiah</i>			
No	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	21.900.000,00	50.225.000,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	3.147.000,00	5.129.000,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	25.047.000,00	55.354.000,00

Tabel 3.38
Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

<i>dalam rupiah</i>					
No	Nama Akun	Belanja Perjalanan Dinas LRA	Beban Perjalanan Dinas 2020 Terutang	Pembayaran Perjalanan dinas tahun 2020	Beban Perjalanan Dinas LO
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	21.900.000,00	0,00	0,00	21.900.000,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	3.147.000,00	0,00	0,00	3.147.000,00
	Jumlah	25.047.000,00	0,00	0,00	25.047.000,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(5) Beban Lainnya	0,00	11.594.000,00

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel.

Beban lainnya tahun 2021 sebesar Rp. 0,00 (nihil), terinci sebagai berikut :

Tabel 3.39

Daftar Rincian Beban Lain-lain
(Beban atas Barang - barang Ekstrakomtabel) Tahun 2020

dalam rupiah

No	Beban Lainnya	Tahun 2021	Tahun 2020
1.	Beban office use	0,00	440.000,00
2.	Beban meubelair	0,00	10.230.000,00
3.	Beban home use	0,00	924.000,00
4.	Beban alat komunikasi telephone	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	11.594.000,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
c). Beban Penyusutan	108.355.881,84	110.781.931,88

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan aset tetap Kecamatan Tempeh tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 108.355.881,84 dan Rp. 110.781.931,88 terinci sebagai berikut :

Tabel 3.40
Daftar Beban Penyusutan Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

NO	URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	83.367.609,98	85.793.660,02
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.988.271,86	24.988.271,86
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN	108.355.881,84	110.781.931,88

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
d). Surplus/Defisit Dari Operasi	-2.111.128.103,84	-2.407.730.959,88

Jumlah tersebut merupakan jumlah defisit dari kegiatan operasi tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. -2.111.128.103,84 dan Rp. -2.407.730.959,88, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.41.
Surplus/Defisit Dari Operasi Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2021	2020
1	Pendapatan	0,00	0,00
	<i>Dikurangi :</i>		
2	Beban Pegawai	1.300.528.238,00	1.548.958.248,00
3	Beban Barang dan Jasa	702.234.984,00	747.990.780,00
4	Beban Penyusutan	108.355.881,84	110.781.931,88
	Jumlah	-2.111.128.103,84	-2.407.730.959,88

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
e). Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	-0,00	-2.407.730.959,88

Jumlah tersebut diperoleh dari akumulasi Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi dan Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. -2.407.730.959,88, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.42.
Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
Tahun 2021 dan 2020

<i>dalam rupiah</i>			
NO	URAIAN	2021	2020
1	Surplus/Defisit Dari Operasi	-2.111.128.103,84	-2.407.730.959,88
2	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
	JUMLAH	-2.111.128.103,84	-2.407.730.959,88

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
f). Surplus/Defisit LO	-2.111.128.103,84	-2.407.730.959,88

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut :

Tabel 3.43
Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2021 dan 2020

<i>dalam rupiah</i>			
No	Surplus (defisit)	2021	2020
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	-2.111.128.103,84	-2.407.730.959,88
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	0,00	0,00
3	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah	-2.111.128.103,84	-2.407.730.959,88

3.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam bentuk ekuitas yang masuk ke dalam Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a). Ekuitas Awal	950.849.825,64	950.849.825,64

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp 590.849.825,64 merupakan ekuitas akhir yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2020 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp. 956.058.787,52 merupakan ekuitas yang akhir telah disajikan di Neraca 2019 *audited*.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b). Surplus/Defisit - LO	-2.111.128.103,84	-2.407.730.959,88

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.44
Jumlah Surplus/Defisit LO Tahun 2021 dan 2020

<i>dalam rupiah</i>			
No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan LO	0,00	0,00
2	Beban	2.111.128.103,84	2.407.730.959,88
3	Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)	-2.111.128.103,84	-2.407.730.959,88
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
5	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
6	Surplus / Defisit LO (3+4+5)	-2.111.128.103,84	-2.407.730.959,88

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
c). Ekuitas Akhir	829.288.869,80	950.849.825,64

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal ekuitas ditambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.45
Ekuitas Akhir Tahun 2021 dan 2020

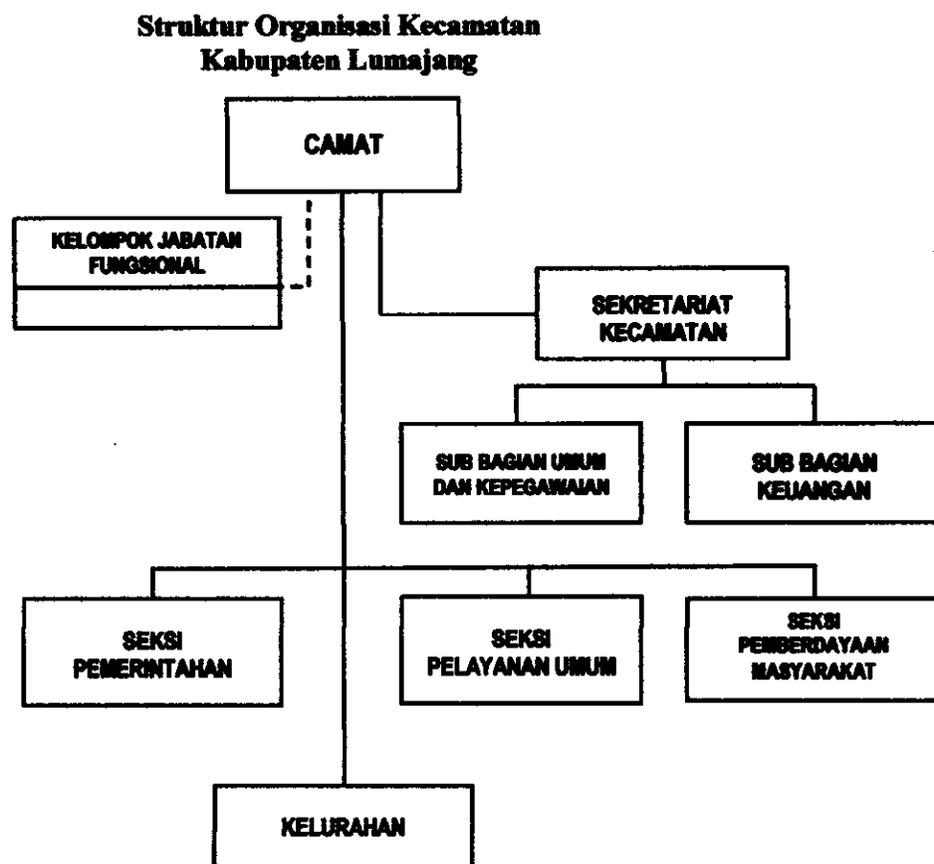
<i>dalam rupiah</i>			
No	Keterangan	2021	2019
1	Ekuitas Awal	950.849.825,64	950.849.825,64
2	Surplus (defisit) LO	-2.111.128.103,84	-2.407.730.959,88
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
4	Lain-Lain (RK-PPKD)	1.989.567.148,00	2.402.521.998,00
5	Ekuitas Akhir	829.288.869,80	950.849.825,64

1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KECAMATAN TEMPEH

Kecamatan Tempeh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :



- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Camat | : Drs. PUJANTO |
| 2. Sekretaris Kecamatan | : HANI PUJANTO, A.Md |
| 2.1. Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian | : Ike Ismiyati Ningsih, S.Pd |
| 2.2. Ka Sub Bag Keuangan | : Uswatun Hasanah, S.Pd.SD |
| 3. Kepala Seksi Pemerintahan | : Kardi |
| 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | : Dra. Suhariyanti |
| 5. Kepala Seksi Pelayanan Umum | : Herry Suwandhono |

3. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Sesuai Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, sebagian diantaranya mengatur sebagai berikut :

- 1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- 2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pelayanan Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 6) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

4. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI :

1) Camat

Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
- d. pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan Kecamatan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik Negara;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

- i. pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- l. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- o. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4) Seksi Pelayanan Umum;

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum;
- c. mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- e. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;

- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5) **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d. mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
- e. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- m. menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, OPD Kecamatan Tempeh didukung oleh SDM sebanyak 25 orang, terdiri dari Pegawai dengan status PNS sebanyak 14 orang dan Tenaga Upah Bulanan sebanyak 11 orang. Berikut ini adalah Daftar Pegawai OPD Kecamatan Tempeh pada Tahun 2021 sebagai berikut :

**Daftar Pegawai OPD Kecamatan Tempeh
Tahun 2021**

No	Nama	NIP.	GOL	Jabatan	Pendidikan	Ket.
1	Drs. Pujianto	19681114 199003 1 004	IV/a	Camat	S-1	
2	Hani Pujianto, AMd	19700929 201001 1 004	III/d	Sekretaris Kecamatan	D-3	-
3	Dra. Suharyanti	19660605 200604 2 017	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	S-1	-
4	Kardi	19700528 199001 1 001	III/c	Kasi Pemerintahan	SLTA	-
5	Herry Suwandhono	19660905 198903 1 009	III/b	Kasi Pelayanan Umum	SLTA	-
6	Ike Ismiyati Ningsih, S.Pd.	19751129 199903 2 004	III/b	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	S-1	-
7	Uswatun Hasanah, S.Pd.SD	19820501 201406 2 008	III/b	Ka Sub Bag Keuangan	S-1	-
8	Sunanwan	19640929 198503 1 010	II/d	Staf	SLTA	Pensiun TMT 1-10-2022
9	Sukietyowati	19650111 200604 2 002	II/d	Staf	SLTA	-
10	Iwan Afrani Ihean	19821001 200604 1 010	II/c	Staf	SLTA	-
11	Amirudin	19670612 199403 1 014	II/c	Staf	SLTA	-
12	Abdus Shomad	19720917 201001 1 002	II/c	Staf	SLTA	-
13	Imam Saffi	19740829 201001 1 004	II/c	Staf	SLTA	-
14	Oyong Suwasono Adi	19750720 201001 1 006	II/c	Staf	SLTA	-
15	Tanti Dwi Astuti, S. Pd	-	-	Staf	S-1	Honoror
16	Rath Madyaning M	-	-	Staf	D-3	Honoror
17	Hardi Santoso	-	-	Staf	SLTA	Honoror
18	Muhammad Sukisno	-	-	Staf	SLTA	Honoror
19	Mulyo Yulyanto	-	-	Staf	SLTA	Honoror
20	Aryani Dwi Utari	-	-	Staf	SLTA	Honoror
21	Farid Vidianata	-	-	Staf	SLTA	Honoror
22	Fiman Diansyah Arie I	-	-	Sopir	SLTA	Honoror
23	Sudirman	-	-	Petugas Kebersihan	SLTA	Honoror
24	Tinerso	-	-	Petugas Kebersihan	SLTA	Honoror
25	Siswo Pranoto	-	-	Penjaga Kantor	SLTA	Honoror

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan pada laporan keuangan OPD Kecamatan Tempeh tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan OPD Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang :
 - a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran Belanja yang telah ditetapkan.
 - b) Perubahan ekuitas sebagai dampak adanya perubahan kebijakan akuntansi.
 - c) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh OPD Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.
 - d) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh OPD Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
3. Isi pokok Laporan keuangan OPD Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang tahun 2021 terdiri dari :
 - a) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD;
 - b) Laporan Operasional yang isinya berupa informasi tentang beban operasional selama satu tahun anggaran;
 - c) Laporan Perubahan Ekuitas yang menginformasikan Ekuitas Awal dan Surplus/Defisit LO; dan
 - d) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Kecamatan Tempeh pada tanggal 31 Desember 2021; serta
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas keempat laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
4. Dari Laporan Realisasi Anggaran diperoleh informasi sebagai berikut :

Dari total Pagu Anggaran Belanja sebesar Rp. 2.021.779.667,00 terealisasi sebesar Rp. 1.989.567.148,00 atau 98,41%, yang meliputi :

 - a) Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 22.021.779.667,00 terealisasi sebesar Rp. 1.989.567.148,00 atau 98,41%, dari anggarannya; dan

b) Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 0 terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggarannya.

5. Dari Neraca diperoleh informasi sebagai berikut :√

Total Aset Tetap OPD Kecamatan Tempeh pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 983.689.781,64 meliputi :

- Aset Lancar sebesar Rp. 12.452.245,00
- Aset Tetap setelah dilakukan penyusutan sebesar Rp. 799.884.979,80 dan
- Aset Lain-lain (Barang-barang yang rusak) sebesar Rp. 52.045.500,00.

6. Dari Laporan Operasional diperoleh informasi sebagai berikut :√

Bahwa OPD Kecamatan Tempeh adalah OPD di Kabupaten Lumajang yang tidak memiliki pendapatan, maka pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 mengalami Defisit sebesar Rp. -2.111.128.103,84 untuk memenuhi Beban Pegawai, Beban Barang/Jasa, dan Beban Penyusutan.

7. Dari Laporan Perubahan Ekuitas diperoleh informasi bahwa :

- a) Ekuitas Awal OPD Kecamatan Tempeh adalah sebesar Rp. 950.849.825,64.
- b) Ekuitas Akhir OPD Kecamatan Tempeh per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 829.288.869,80.